



## **KEPEMIMPINAN PARTAI POLITIK PEROLEHAN KURSI TERBANYAK PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN GOWA PADA PEMILU 2019**

**Muhammad Imran<sup>1</sup>, Sofyanto Torau<sup>2</sup>**

Universitas Hasanuddin<sup>1</sup>

Universitas Indonesia Timur<sup>2</sup>

\*Email Korespondensi: [imranfisipol@gmail.com](mailto:imranfisipol@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Kekuatan pemimpin memberikan arti penting dalam memberikan arah kebijakan suatu organisasi dalam mencapai harapan yang kedepan, salah organisasi politik yang mewarnai kehidupan Negara demokrasi adalah lahirnya partai politik seperti halnya dalam penelitian ingin mengetahui langka-langka yang diambil Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam meningkatkan perolehan kursi di DPRD Kabupaten Gowa pada Pemilu 2019 dengan perolehan kursi terbanyak DPRD Kabupaten Gowa dalam pemilihan legislatif 2019 diantara partai-partai yang ikut bertanjung pada pileg tahun 2019. Partai berlambang Ka'bah itu berhasil meloloskan 8 (delapan) usungan caleg untuk menduduki kursi DPRD Gowa. Hasil ini juga memastikan PPP mendapat kursi Ketua DPRD Gowa Periode 2019-2024. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif naratif. Adapun pengambilan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang didapatkan kemudian dianalisa dalam kerangka teoritis pemikiran Maurice Duverger tentang kepemimpinan di dalam partai politik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal keanggotaan ada 3 (tiga) hal yang dilakukan oleh PPP Kabupaten Gowa. Pertama, PPP terbuka untuk merekrut tokoh-tokoh masyarakat berpengaruh untuk bergabung menjadi pengurus dan caleg PPP. Kedua, PPP Kabupaten Gowa terbuka dengan tidak meminta mahar politik kepada calegnya. Hal ini membuat para caleg merasa nyaman dan fokus bekerja dalam memenangkan pemilu. Kebijakan ini dilakukan oleh Nursyam Amin sebagai Ketua DPC PPP Kabupaten Gowa ketiga kekuatan salah seorang manta ketua DPC PPP dan sekarang menjadi anggota DPR RI bapak Amir Uskara.

**Kata Kunci:** Partai Politik, Kepemimpinan, Kebijakan Internal

### **ABSTRACT**

*The power of the leader provides an important meaning in providing the direction of an organisation's policy in achieving future expectations, one of the political organisations that colour the life of a democratic country is the birth of political parties as well as in the research wants to know the rare steps taken by the United Development Party (PPP) in increasing the acquisition of seats in the Gowa Regency DPRD in the 2019 elections with the highest number of seats in the Gowa Regency DPRD in the 2019 legislative elections among the parties that*



*participated in the 2019 legislative elections. The party bearing the Ka'bah symbol managed to pass 8 (eight) candidates to occupy the Gowa DPRD seats. This result also ensured that PPP won the chair of the Gowa DPRD for the 2019-2024 period. The type of research used is narrative qualitative research. The data were collected through interviews and documentation. The data obtained was then analysed within the theoretical framework of Maurice Duverger's thoughts on leadership in political parties. The results of this study show that in terms of membership there are 3 (three) things done by PPP Gowa Regency. First, the PPP is open to recruiting influential community figures to join the PPP board and candidates. Second, PPP Gowa Regency is open by not asking for political dowry to its candidates. This made the candidates feel comfortable and focused on working to win the election. This policy was carried out by Nursyam Amin as the Chairman of the DPC PPP Gowa Regency and the power of one of the former chairman of the DPC PPP and now a member of the House of Representatives, Mr Amir Uskara.*

**Keywords:** *Political Party, Leadership, Internal Policy*

## PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang penelitian, inti permasalahan dan tujuan penelitian secara ringkas dan padat. Ditulis dengan menggunakan Times New Roman 12 point (tegak) dengan spasi 1. Tiap paragraf diawali dengan kata yang menjorok ke dalam 5 digit. Partai Islam hadir di tengah-tengah menguatnya institusi negara-bangsa yang modern pada negara berpenduduk mayoritas Muslim. Sebagian dari partai Islam justru muncul karena merespons gejala sekularisasi yang semakin menjauhkan aspek-aspek agama dari kehidupan sosial politik. Mereka merupakan bagian dari instrumen kebangkitan gerakan keagamaan dalam perubahan sosial yang terseret modernisasi dan westernisasi, tetapi bagian lainnya muncul untuk memperkuat rezim yang otoriter atau menciptakan tatanan politik teokrasi. Karena karakteristik partai Islam sangat beragam dan tergantung pada situasi politik yang berlangsung di negaranya, mereka tidak mungkin dapat dipahami sebagai fenomena yang tunggal, sebagaimana karakteristik politik Islam itu sendiri yang dipengaruhi oleh situasi dan konteks lokal, demikian pula karakter partai Islam terbentuk sesuai responsnya terhadap situasi yang ingin mereka atasi [1].

Bangkitnya partai-partai Islam dalam pemilu menandakan berlangsungnya reorganisasi kekuatan kelompok-kelompok Islam yang menghubungkan partai Islam, komunitas Muslim, organisasi Islam, dan organisasi-organisasi paramiliter. Mereka berupaya untuk memperkuat pengaruh Islam dalam ruang sosial dan politik di masyarakat ketika dominasi rezim Orde Baru memudar di Indonesia, partai-partai berbasis Islam tampil dengan simbol-simbol Islam yang kuat. Wacana tentang pentingnya menerapkan prinsip Islam sebagai solusi atas krisis multi dimensi menjadi topik yang senantiasa mereka kemukakan. Sekilas tindakan-tindakan tersebut terjadi karena penuh dengan dorongan ideologis, di mana partai-partai Islam berupaya menerapkan prinsip dan simbol Islam ke dalam tatanan kehidupan politik dan pemerintahan [2].

Dinamika politik Indonesia Orde Baru banyak partai Islam yang telah terbentuk sebelumnya, namun pemerintah orde baru melakukan fusi partai hanya ada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang mewakili umat Islam, setelah reformasi partai-partai Islam pun turut bermunculan dan tidak lagi menghimpunkan diri dalam PPP seperti sebelumnya. Dari puluhan partai lahir pada awal masa reformasi, tidak banyak partai Islam bertahan. Hanya ada empat partai yang saat ini memiliki kursi di DPR periode 2019-2024, di antaranya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Pada Pemilu 2019, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kabupaten Gowa berhasil meraih perolehan suara 60.065 dengan persentase 14,64%. PPP mendapat kursi terbanyak DPRD Kabupaten Gowa dalam pemilihan legislatif 2019. Partai berlambang Ka'bah itu berhasil meloloskan 8 (delapan) usungan caleg untuk menduduki kursi DPRD Gowa. Hasil ini juga memastikan PPP mendapat kursi Ketua DPRD Gowa Periode 2019-2024, yaitu Rafiuddin Raping. Kemenangan ini memiliki selisih tipis dengan Partai Gerindra yang memperoleh persentase sebesar 14,56% dengan perolehan sebanyak 7 (tujuh) kursi. Dibandingkan dengan tiga partai lainnya, PKB berhasil meningkatkan perolehan kursi dari 1 kursi menjadi 4 kursi. PKS sendiri tidak mengalami peningkatan karena jumlah kursi dari 2014 ke 2019 tetap sama yaitu 3 kursi. PAN justru mengalami penurunan dari 5 kursi menjadi 3 kursi, sehingga untuk DPRD Kabupaten Gowa hanya PKB dan PPP sebagai partai Islam yang mengalami peningkatan jumlah kursi. Hanya PPP yang berhasil memenangkan Pileg DPRD Kabupaten Gowa dan menghantarkan kadernya menjadi Ketua DPRD Kabupaten Gowa 2019-2024 [3].

Perolehan kursi PPP Gowa meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Pada periode 2014-2019, PPP Gowa hanya mendapat 6 kursi dan kini bertambah menjadi 8 kursi. Kemenangan PPP di Kabupaten Gowa berhasil mengambil jatah kursi Ketua DPRD Kabupaten Gowa dari Partai Golkar yang sebelumnya 9 (sembilan) menjadi 3 (tiga) kursi saja di Pemilu 2019.

Maurice Duverger menjelaskan suatu uraian tentang partai politik dengan menekankan bahwa mencari perbedaan karakteristik partai-partai politik itu sendiri bisa dilakukan dengan melihat struktur dan anatomi masing-masing partai politik. Mencari karakteristik partai-partai politik bisa dilakukan dengan meninjau segi organisasi, keanggotaan, maupun aspek kepemimpinannya. Dengan cara tersebut Duverger mencoba mengklasifikasikan partai-partai politik berdasarkan "direct structure" dan "indirect structure". Struktur yang pertama keanggotaan seseorang dalam partai politik semata-mata dilihat sebagai individu-individu yang secara langsung masuk dan mengikatkan diri dalam partai tertentu. Sedangkan struktur yang kedua, keanggotaan seseorang dalam suatu partai politik diperoleh berdasarkan keikutsertaannya dalam organisasi yang bernaung di bawah suatu partai. Contoh keanggotaan partai politik tidak langsung ini dapat dilihat di Indonesia sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, dimana hampir semua partai politik memiliki organisasi onderbouw pada berbagai bidang kehidupan masyarakat, seperti buruh, tani, nelayan dan lain-lain.

Pembedaan antara partai "massa" dan "kader" pertama kali dikemukakan oleh Maurice Duverger dalam bukunya *Les Partis Politiques*. Inti dari perbedaannya adalah perbedaan dalam struktur keuangan mereka. Bagi Duverger, perbedaan utama antara kedua jenis partai ini terletak pada strukturnya. Partai "kader" umumnya termasuk dalam "keanggotaannya" (kalau bisa dikatakan memiliki keanggotaan tertentu) hanya sekelompok terbatas dari orang-orang paling aktif yang berbagi tujuan partisan yang sama sedangkan partai "massa" terbuka untuk semua yang peduli untuk bergabung. Dua faktor yang menentukan sistem keanggotaan yang khas adalah metode pendidikan politik para anggota dan organisasi keuangan. Partai "kader" melakukan sedikit atau tidak sama sekali pendidikan politik bagi para anggotanya sendiri, sedangkan partai "massa" pada umumnya melaksanakan program pendidikan massa internal yang ekstensif. Tetapi dalam pembiayaan mereka perbedaan itu paling menonjol. Secara finansial, partai "kader" bergantung pada kontribusi beberapa pendukung besar, seringkali dari luar partai, sedangkan partai "massa" pada dasarnya didasarkan pada iuran yang dibayarkan oleh para anggotanya [4].

Duverger merinci sejumlah perbedaan besar lainnya antara kedua jenis partai ini, termasuk kelas, orientasi ideologis, dan tingkat komitmen. Akan tetapi, dia sangat menonjolkan unsur-unsur yang terkait langsung dengan struktur organisasi. Ini termasuk perbedaan-perbedaan berikut. (1) Partai massa condong ke unit "cabang" sebagai bentuk organisasi lokalnya. Ini

"berbasis lebih luas dan kurang eksklusif" daripada "kaukus" partai kader. Di dalam partai massa pendidikan politik anggota melengkapi kegiatan elektoral, dan ada organisasi administratif dengan pejabat tetap. (2) Partai massa terartikulasi dengan kuat, dan (3) lebih tersentralisasi dibandingkan partai kader. (4) Memiliki kepemimpinan yang lebih oligarkis dibandingkan partai kader, dan (5) jumlah anggota yang sangat besar dibandingkan partai kader. Terakhir, (6) ia memiliki jangkauan aktivitas yang jauh lebih besar, bahkan permanen, daripada partai kader, yang menyelimuti sebagian besar kehidupan komunitas anggota; hal ini dibandingkan dengan kegiatan elektoral atau peristiwa politik khusus yang mencirikan partai kader .

Mengenai pengorganisasian partai-partai dalam demokrasi, Duverger melihatnya sebagai perkembangan alami dari partai 'kader' menjadi partai 'massa'. Bagi mereka konsep 'keanggotaan' tidak banyak artinya. Sebaliknya partai-partai ini mencerminkan kebutuhan terbatas para pemimpin partai untuk beberapa cara menjangkau pemilih di era sebelum hak pilih universal. Hak pilih universal dimana Duverger menegaskan, menciptakan kondisi untuk jenis organisasi baru. Partai-partai semacam itu dengan jelas mendefinisikan anggotanya, memberi mereka peran sentral dalam mengarahkan partai, dan mengabdikan diri untuk kepentingan anggota. Para anggota terlibat erat dalam menentukan strategi partai dan dalam menyediakan pekerjanya. Iuran anggota memberikan dukungan keuangan yang dibutuhkan untuk kegiatan partai. Bagi Duverger, perbedaan antara partai 'keanggotaan' dan 'kader' bukanlah masalah klaim keanggotaan; sebaliknya, hubungan antara partai dan anggotanyalah yang mendefinisikan partai 'keanggotaan'. Partai keanggotaan sejati adalah tentang anggotanya, tentang membawa mereka ke dalam politik dan mendidik mereka tentang alat-alat politik [5].

Dalam membayangkan kontrol partai politik oleh anggota yang diambil dari pemilih, Duverger memegang pandangan yang dipegang secara luas tentang bagaimana partai harus diorganisir. Pemilihan berulang menawarkan perangkat pengorganisasian yang menarik kepada kelompok mana pun. Dengan meluasnya hak pilih, serikat buruh, gereja, dan koperasi, semua organisasi yang beranggotakan berusaha untuk menggunakannya, baik dalam membentuk partai-partai baru maupun dalam mempengaruhi partai-partai yang sudah ada. Gerakan sosialis, khususnya, telah melihat dalam pemilihan sebuah mekanisme di mana mereka dapat merekrut anggota dan mengorganisir diri mereka sendiri .Dalam kaitannya dengan karakteristik keanggotaan, Duverger membedakan antara partai-partai kader (*cadre party*) dengan partai massa (*mass party*). Proses seleksi keanggotaan dalam partai kader dilakukan dengan sangat ketat dan memperhatikan berbagai aspek, seperti keterampilan, prestise, pengalaman politik serta bobot pengaruhnya yang diharapkan bisa menarik pendukung-pendukung dalam pemilihan umum. Partai massa cenderung mendapatkan jumlah anggota yang sebanyak-banyaknya dengan elit kepemimpinan yang diseleksi secara ketat.

Duverger menganalisis metode pemilihan pemimpin dalam partai dimana secara resmi pimpinan partai hampir selalu dipilih oleh anggota dan diberi masa jabatan yang cukup singkat, sesuai dengan aturan demokrasi. Dalam praktiknya sistem pemilihan demokratis digantikan dengan metode rekrutmen otokratis: *co-option*, penunjukan oleh badan pusat, pencalonan, dan sebagainya. Data tentang partai-partai di seluruh dunia cenderung menguatkan anggapan Duverger bahwa pemimpin partai muncul dari metode pemilihan yang otokratis. Duverger menghubungkan otokrasi yang tidak terselubung dalam pemilihan kepemimpinan dengan doktrin sayap kanan, sementara sayap kiri menunjukkan sistem kepemimpinan yang sangat terpusat dan tersentralisasi .

Terkait oligarki dalam kepemimpinan, Duverger mengemukakan bahwa Kepemimpinan partai cenderung secara alami mengambil bentuk oligarki. Sesungguhnya 'kelas penguasa' muncul yang kurang lebih tertutup, itu adalah 'lingkaran dalam' yang sulit ditembus. Di sini Duverger tidak berbicara tentang kepemimpinan puncak partai tetapi tentang korps kepemimpinan, yang sering dia samakan dengan calon parlemen dan delegasi konferensi.

Duverger mengajukan hipotesis yang tidak biasa tentang penyebab keragaman sosial dalam kepemimpinan partai bahwa sama sekali tidak pasti bahwa susunan sosial dari sekelompok pemimpin terpilih lebih mirip dengan massa anggota daripada susunan sosial dari oligarki pemimpin yang direkrut dengan metode otokratis, sebaliknya, ada setiap alasan untuk menganggap bahwa yang sebaliknya adalah benar. Rakyat desa tidak memilih rakyat desa sebagai perwakilan parlemen mereka, tetapi tampaknya lebih memilih pengacara, karena mereka menganggap mereka lebih mampu membela kepentingan mereka di parlemen. Hasilnya adalah promosi (sirkulasi) elit hanya mungkin terjadi di partai-partai dengan tingkat sentralisasi yang cukup tinggi, di mana para pemimpin dapat "memaksakan" kaum muda ke dalam partai, atau di partai-partai yang terorganisir dengan sangat lemah dalam beberapa keadaan luar biasa [6].

Otoritas Pemimpin dalam pandangan Duverger melihat dua fakta penting yang mendominasi evolusi partai, peningkatan otoritas pemimpin dan kecenderungan bentuk otoritas pribadi. Secara keseluruhan, munculnya partai-partai otoriter bertepatan dengan munculnya partai-partai massa. Partai-partai massa memiliki kecenderungan alamiah untuk menjadi partai-partai yang disiplin .

Hubungan antara pemimpin partai ndan perwakilan Parlemen dikatakan Duverger berlawanan dengan teori demokrasi, dimana di banyak partai terlihat kecenderungan pemimpin partai untuk memberikan perintah kepada perwakilan parlemen atas nama anggota militan. Duverger membahas berbagai teknik untuk memastikan kesesuaian dengan kebijakan partai, yang akan kami masukkan ke dalam konsep disiplin administrasi yang lebih luas. Hampir setengah dari jumlah partai di dunia memberikan kekuasaan disiplin kepada organ nasional di luar parlemen. Duverger berhipotesis bahwa variasi dalam hubungan antara pemimpin partai dan wakilnya dapat dijelaskan oleh ideologi partai. Dia berpendapat bahwa dominasi perwakilan atas organisasi berlaku terutama untuk partai-partai tipe lama, yang didirikan di atas kaukus, yang pada saat yang sama adalah partai-partai tipe "kelas menengah", yaitu partai-partai konservatif dan tengah. Dalam partai-partai Sosialis terdapat ketegangan, jika bukan keseimbangan, antara para pemimpin internal dan wakil-wakil parlementer. Dengan partai-partai Komunis dan Fasis kita mencapai tahap terakhir perkembangan, yaitu perwakilan parlemen di sini tidak mengontrol partai, melainkan partai mengontrol perwakilan.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian kualitatif dengan studi naratif. Studi naratif bisa didefinisikan sebagai studi yang berfokus pada narasi, cerita, atau deskripsi tentang serangkaian peristiwa terkait dengan pengalaman manusia. Penelitian ini mengumpulkan berbagai data untuk dapat menjelaskan bagaimana upaya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sehingga meningkatkan perolehan kursi di DPRD Kabupaten Gowa pada Pemilu 2019. Penelitian ini menggunakan data primer yang bersumber dari hasil wawancara langsung bersama informan yaitu kader Partai Persatuan Pembangunan, caleg dan masyarakat pemilih. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara mendalam dan dokumentasi

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### **Kepemimpinan Kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan**

Aspek kepemimpinan dalam Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Gowa memberikan kontribusi pada kemenangan di Pemilu 2019 dari aspek kepemimpinan ada dua hal yang menarik. Pertama, kebijakan Nursyam Amin sebagai Ketua DPC PPP Kabupaten Gowa yang inklusif, Otoritas Pemimpin dalam pandangan Duverger melihat dua fakta penting

yang mendominasi evolusi partai, peningkatan otoritas pemimpin dan kecenderungan bentuk otoritas pribadi. Nursyam Amin adalah Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Gowa. Sebagai pimpinan partai, Nursyam Amin memiliki hak dan kewajiban untuk membesarkan PPP di Kabupaten Gowa. Menghadapi pemilu 2019 lalu, dirinya mengambil keputusan untuk bagaimana PPP di Kabupaten Gowa ini bisa menjadi partai yang diterima semua kalangan. Duverger merinci sejumlah perbedaan besar lainnya antara partai kader dan partai massa. Partai massa condong ke unit "cabang" sebagai bentuk organisasi lokalnya, yang berbasis lebih luas dan kurang eksklusif. DPC PPP Kabupaten Gowa sebagai cabang di tingkat kabupaten menunjukkan karakteristik partai massa. Karakter ini terlihat dari kebijakan Ketua DPC, Nursyam Amin ketika Pemilu 2019 yang ingin agar basis pemilih itu bisa seluas dan sebanyak mungkin yang memilih PPP. Eksklusivitas sebagai partai Islam juga ditanggalkan agar lebih banyak kelompok yang bisa dijangkau, mengingat sebelumnya partai pemenang pemilu di Kabupaten Gowa adalah Partai Golkar yang merupakan partai nasionalis.

Duverger mengemukakan partai-partai massa mencerminkan kebutuhan para pemimpin partai untuk beberapa cara menjangkau pemilih. Partai memberi mereka peran sentral dalam mengarahkan partai. Nursyam Amin sebagai Ketua DPC PPP Kabupaten Gowa membutuhkan suara yang banyak agar PPP bisa memenangkan pemilu di Kabupaten Gowa. Karena bertanggungjawab pada hasil pemilu nantinya, maka Nursyam Amin mengambil langkah untuk membuat PPP Kabupaten Gowa tidak terlalu menonjolkan sebagai partai Islam. PPP Kabupaten Gowa seolah menunjukkan dirinya sebagai partai yang semakin terbuka dan lebih terbuka dibandingkan partai-partai lainnya yang nasionalis. Wahyuni Nurdani adalah salah satu anggota DPRD Kabupaten Gowa dari PPP yang merupakan caleg muda lulusan PGSD sekaligus perempuan berhasil terpilih dari unsur pemuda tokoh masyarakat, atau figur publik adalah orang-orang yang memiliki pengaruh di masyarakat, baik tokoh masyarakat yang dipilih secara formal maupun yang didapatkan secara informal sebagai langkah untuk mendapatkan simpatikan masyarakat. Seorang tokoh masyarakat merupakan seseorang yang memiliki posisi dalam lingkungan tertentu dan memiliki pengaruh besar. Mereka umumnya dianggap penting oleh masyarakat dan dekat dengan kepentingan umum.

Salah satu tokoh masyarakat yang dikenal di Kabupaten Gowa sekaligus tokoh politik adalah Amir Uskara. Amir Uskara saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PPP dan Ketua Fraksi PPP di DPR-RI periode 2019-2024. Amir Uskara juga dipercaya menjabat Wakil Ketua Komisi XI DPR RI yang mengurus keuangan dan perbankan. Sebelumnya Amir Uskara merupakan anggota DPRD Gowa periode 1999-2002, kemudian berlanjut dipilih lagi hingga Pemilu 2004-2009 dan di Pemilu 2009 ia meningkat dengan menduduki anggota DPRD tingkat Provinsi Sulsel hingga 2014. Hingga dalam perjalanannya kemudian, tepatnya pada Pemilu tahun 2014 dia menduduki kursi parlemen tingkat pusat dan berhasil hingga memasuki periode keduanya di 2019. Sebagai orang Gowa, Amir Uskara terpanggil untuk bagaimana membantu kemenangan dari PPP di Kabupaten Gowa. Upaya ini dilakukan dengan bekerja sama para caleg DPRD Kabupaten Gowa dalam kampanye di Pemilu 2019.

Menurut Duverger, di banyak partai terlihat kecenderungan pemimpin partai untuk memberikan perintah kepada perwakilan parlemen atas nama anggota militan. Perintah ini juga termasuk dalam rangka meraih kemenangan di pemilu, bagaimana seluruh anggota yang ada di parlemen harus membantu upaya partai untuk mendapatkan suara terbanyak. Amir Uskara merupakan Wakil Ketua Umum DPP PPP sekaligus Ketua Fraksi PPP di DPR-RI. Dengan Kabupaten Gowa sebagai salah satu daerah pemilihannya maka dia sebenarnya harus mendukung upaya DPC PPP Kabupaten Gowa dalam meraih dukungan. Amir Uskara sebagai pemimpin partai justru memberikan contoh dimana dia sendiri terjun langsung membantu kampanye dari caleg-caleg PPP di DPRD Kabupaten Gowa.

Salah satu tugas seorang pemimpin partai adalah menyusun strategi, komunikasi, pendekatan, dan tindakan yang harus diambil oleh partai politik [7]. rekrutmen dengan

mendekati tokoh-tokoh masyarakat Kabupaten, PPP Kabupaten Gowa memberikan fasilitas kepada tokoh-tokoh masyarakat untuk bergabung dan maju di Pileg DPRD tahun 2019. Fasilitas ini antara lain berkas-berkas yang diuruskan untuk mendaftar sebagai caleg dan tidak dipersulit dalam administrasi internal partai untuk bergabung menjadi kader PPP dan dimajukan dalam Pileg DPRD Kabupaten Gowa tahun 2019.

### **Kebijakan Tanpa Mahar Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Gowa**

Masing-masing partai punya strategi sendiri merekrut caleg. Sebagian menggunakan rekrutmen terbuka agar masyarakat turut serta. Sebagian lagi lewat cara personal dengan mendekati tokoh-tokoh potensial pendulang suara. Keinginan untuk menjadikan partainya menjadi yang terbaik tidak terlepas dari anggota partai dan dukungan politik. Partai politik melakukan rekrutmen dalam rangka untuk mengisi jabatan-jabatan politik. Mengembangkan sistem rekrutmen menjadi bagian awal yang sangat penting dalam pendirian partai politik. Pengurus partai harus memiliki kualitas yang baik yang mampu mengorganisir jalannya partai politik.

Dalam memenangkan Pemilu 2019, DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Gowa melakukan rekrutmen dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat Kabupaten Gowa untuk bergabung menjadi kader PPP dan dimajukan dalam Pileg DPRD Kabupaten Gowa tahun 2019. Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Gowa menerapkan prinsip partai massa dalam merekrut kader yang diusung pada Pemilu 2019. Merekrut tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh dan mau bergabung di PPP menjadi strategi untuk mendapatkan banyak suara di Pileg DPRD Kabupaten Gowa. Untuk menjalankan kepentingan internal, PPP Kabupaten Gowa membutuhkan kader-kader yang berkualitas yang mampu menjalankan mesin perpolitikan partai. Dari hal tersebut partai politik berusaha mencari dan mendapatkan dukungan dari masyarakat dengan cari merekrut orang berpengaruh untuk menjadi anggota.

Perekrutan ini dilakukan secara informal, dalam pengertian dan fakta bahwa ada upaya persuasif untuk mengajak tokoh-tokoh masyarakat yang berkualitas dan berpengaruh agar mau bergabung di PPP. PPP Kabupaten Gowa dengan memberikan kemudahan-kemudahan yang dibutuhkan untuk bergabung menjadi pengurus partai PPP kabupaten Gowa. Fasilitas ini antara lain berkas-berkas yang diuruskan untuk mendaftar sebagai caleg dan tidak dipersulit dalam administrasi internal partai.

Duverger melihat partai-partai sebagai perkembangan alami dari partai 'kader' menjadi partai 'massa'. Partai-partai semacam itu memberi anggota peran sentral dalam mengarahkan partai. Para anggota terlibat erat dalam menentukan strategi partai dan dalam menyediakan pekerjanya. Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Gowa yang bergerak menjadi partai massa memberi kemudahan kepada tokoh-tokoh masyarakat yang bergabung ke dalam partainya. Mereka tidak lagi dibebani oleh persoalan administratif sehingga mereka betul-betul fokus dalam kampanye pemenangan pemilu. Mereka sebagai kader PPP memiliki keleluasaan dalam mengambil dan menentukan strategi agar bisa meraih sebanyak-banyaknya suara. Tokoh-tokoh masyarakat ini juga memiliki tim di tengah-tengah masyarakat yang bekerja bagi dirinya dan bagi PPP Kabupaten Gowa.

Keanggotaan PPP Kabupaten Gowa baik pengurus maupun caleg yang telah bergabung merupakan salah satu upaya untuk mencapai keberhasilan yang bersifat pragmatis, yaitu memenangkan Pileg DPRD Kabupaten Gowa tahun 2019. Para tokoh masyarakat ini memiliki kompetensi dalam hal mampu mengumpulkan massa dan pemilih untuk memilih dirinya dan berdampak pada kemenangan PPP Kabupaten Gowa. Massa dan pemilih dapat dikembangkan menjadi pengikut setia bagi PPP untuk mempertahankan kemenangannya di Kabupaten Gowa pada pemilu berikutnya.

Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Gowa dalam upaya untuk mendapatkan dukungan di Pemilu 2019 fasilitas lain yang diberikan dengan adanya kebijakan tidak meminta

mahar politik dari para caleg yang telah masuk dalam daftar calon tetap termasuk dalam penentuan nomor urut. Biasanya perekrutan yang bersifat informal, ketika individu direkrut privat (sendirian) atau "di bawah tangan" tanpa melewati atau sangat sedikit melalui sarana kelembagaan", sangat rawan dengan namanya mahar politik. Hal ini dikarenakan ada pengistimewaan khusus bagi caleg tersebut yang ingin mendapatkan akses lebih. Sebagaimana poin sebelumnya dijelaskan bahwa PPP Kabupaten Gowa sangat mempermudah bagi calegnya untuk masuk dan maju di pemilu, utamanya dari tokoh-tokoh masyarakat. Partai massa menurut Duverger cenderung mendapatkan jumlah anggota yang sebanyak-banyaknya. PPP Kabupaten Gowa berusaha untuk mendapatkan dukungan sebanyak mungkin lewat perekrutan caleg. Seringkali memang yang menjadi hambatan ketika caleg dimintai mahar politik dengan iming-iming kemudahan dan prioritas dalam nomor urut caleg.

Dengan tidak menerapkan mahar politik, PPP Kabupaten Gowa telah bersikap objektif dan rasional. Para caleg diberikan kesempatan untuk berkontestasi dengan baik dan adil dengan kesempatan yang sama. Tidak ada persyaratan yang berat diberikan kepada caleg. Rekrutmen tanpa mahar politik dapat menarik minat pilih masyarakat terhadap partai dan membangun kepercayaan caleg kepada partainya sehingga dapat betah dan berjuang bagi partainya.

### **Kekuatan Strongman tokoh PPP di Kabupaten Gowa**

Terkait oligarki dalam kepemimpinan, Duverger mengemukakan bahwa Kepemimpinan partai cenderung secara alami mengambil bentuk oligarki. Di sini Duverger tidak berbicara tentang kepemimpinan puncak partai tetapi tentang korps kepemimpinan. Amir Uskara telah lama dikenal sebagai tokoh PPP di Kabupaten Gowa, hingga di Sulawesi Selatan bahkan di level nasional. Amir Uskara dapat dikatakan juga cukup senior dan telah lama dalam kepemimpinan PPP sehingga membentuk oligarki kepemimpinan sejak masih di tingkat Sulsel hingga pusat. Penulis melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Amir Uskara ketika Pemilu 2019 dalam membantu kemenangan PPP di Gowa juga lebih kepada menjaga dan memenangkan dirinya sebagai caleg DPR-RI petahana. Upaya ini dilakukan dengan menggandeng rekan-rekan separtai yang juga maju agar bersama-sama berkampanye untuk menang bersama juga. Hal inilah yang terjadi di PPP Kabupaten Gowa.

Figur Amir Uskara, fungsionaris PPP di level nasional dan DPR-RI yang merupakan orang asli Gowa. Hal ini menjadi magnet tersendiri bagi PPP di Kabupaten Gowa untuk mendapatkan dukungan masyarakat karena pengaruh ketokohan dan membuat orang tertarik untuk mencalonkan diri melalui PPP.

Amir Uskara membuktikan bahwa dirinya mampu membantu kemenangan PPP di Kabupaten Gowa. Bagaimana dia mengajak para caleg-caleg DPRD Kabupaten Gowa dari PPP untuk berkampanye bersama, alat peraga bersama yang juga digunakan sehingga meringankan biaya yang dikeluarkan oleh caleg tersebut. Kemenangan PPP Kabupaten Gowa juga direncanakan sebagai batu loncatan bagi Amir Uskara untuk maju di Pemilihan Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2024. Upaya dalam membesarkan PPP menjadi tolak ukur keberhasilan yang berpotensi didapatkan di 2024. Menurut Duverger, partai massa memang cenderung lebih oligarkis dibandingkan partai kader. Amir Uskara yang merupakan tokoh publik dan tokoh lama bagi PPP di Kabupaten Gowa berhasil menggunakan partainya untuk kepentingan politik pribadinya, meski di satu sisi menguntungkan juga bagi PPP sendiri.

Anggapan Duverger bahwa pemimpin partai muncul dari metode pemilihan yang otokratis termasuk dalam hal pencalonan. Amir Uskara yang telah lama menjadi tokoh sentral PPP di Kabupaten Gowa akan cenderung menjadikan kemenangan PPP di DPRD Kabupaten Gowa sebagai sarana dan alat untuk dicalonkan dari internal partai sebagai Calon Bupati Gowa. Ini menjadi bentuk timbal balik antara Amir Uskara dan DPC PPP Kabupaten Gowa. Karena Amir Uskara telah membantu kemenangan PPP di DPRD Kabupaten Gowa pada Pemilu 2019, maka PPP Kabupaten Gowa akan mengusung Amir Uskara di Pilkada. Kemenangan Partai Persatuan

Pembangunan di Kabupaten Gowa pada Pemilu 2019 merupakan sebuah sejarah dimana PPP berhasil mengalahkan dominasi Partai Golkar dalam sejarah pemilu di Kabupaten Gowa, dan juga menunjukkan bahwa partai Islam seperti PPP juga memiliki eksistensi hingga kini yang tidak dapat diremehkan.

## SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kemenangan PPP di Kabupaten Gowa pada Pemilu 2019 sebagai bentuk eksistensi partai Islam dipengaruhi oleh aspek kepemimpinan pengurus Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Gowa. aspek kepemimpinan, kebijakan Nursyam Amin sebagai Ketua DPC PPP Kabupaten Gowa mengambil langkah untuk merekrut para tokoh masyarakat yang berpengaruh untuk bergabung menjadi pengurus dan caleg pada 2019. Aspek kedua kebijakan tanpa mahar politik dalam mencalonkan sebagai caleg di PPP. Kebijakan tanpa mahar hal ini dilakukan agar mengurangi beban biaya bagi caleg untuk meju pada pileg 2019 terbukti antusias masyarakat terhadap partai dan membangun kepercayaan kepada partainya sehingga dapat betah dan berjuang bagi partainya. Aspek ketiga kekuatan tokoh masyarakat dalam hal ini Amir Uskara pengaruh ketokohan dan membuat orang tertarik untuk mencalonkan diri melalui PPP.

Dari hasil penelitian yang diperoleh, memberikan beberapa saran yang dapat menjadi rekomendasi bagi beberapa pihak. (1) Bagi Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Gowa, agar tetap mempertahankan pola keanggotaan yang terbuka dan tegas tidak menerapkan mahar politik. Mengingat pemilu ke depan, PPP Kabupaten Gowa perlu membranding diri menjadi partai yang mampu mewakili suara generasi muda mengingat persentase pemilih muda yang cukup besar. (2) Bagi pengurus PPP Kabupaten Gowa, agar bersikap kritis dalam mengevaluasi berbagai kebijakan yang dikeluarkan anggota pengurus dalam memperhalus elektabilitas PPP kedepan.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] A.G. Herdiansah, Pragmatisme Partai Islam Di Indonesia: Pendekatan Tindakan Sosial. *SosioGlobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, vol. 1, no. 2, p. 152-167, 2017.
- [2] P. Mosheni and C. Wilcox, *Religion and Political Parties*. New York: Routledge, 2012.
- [3] PPP Kalahkan Partai Prabowo Subianto di Gowa, Peroleh 8 Kursi & Gerindra 7, Ini Jumlah Suaranya. *TribunGowa.com*, <https://makassar.tribunnews.com/2019/05/14/ppp-kalahkan-partai-prabowo-subianto-di-gowa-peroleh-8-kursi-gerindra-7-ini-jumlah-suaranya>. May 14, 2019.
- [4] M. Duverger, *Partai Politik dan Kelompok Kepentingan*. Jakarta: Bina Aksara, 1984.
- [5] H. M. Angell, Duverger, Epstein and the Problem of the Mass Party: The Case of the Parti Québécois. *Canadian Journal of Political Science / Revue Canadienne de Science Politique*, vol. 20, no. 2, p. 363–378, 1987.
- [6] K. Janda, and D.S. King, Formalizing and Testing Duverger's Theories on Political Parties. *Comparative Political Studies*, vol. 18, no. 2, p. 139–169, 1985.
- [7] W. Hofmeister and K. Grabow, *Political Parties : Functions and Organisation in Democratic Societies*. Singapore: Konrad Adenauer Stiftung, 2011.